



Strategi Pengembangan *E-Government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang

Nafisah Aulia Rani¹, Rumzi Samin², Okparizan³

^{1,2,3} Program Sudi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Jl. Raya Dompok, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau

ARTICLE INFO

Article history:

Received 22/06/2023

Received in revised form 06/07/2023

Accepted 04/09/2023

Abstract

Since 2018 the Tanjungpinang City Government has started developing e-Government. e-Government development efforts are also a target in the 2018-2023 RPJMD of Tanjungpinang City in 2022 with the coordinator are Dinas Communication and Information of Tanjungpinang City . The purpose of this study is to find out how the strategy carried out by the Dinas Communication and Informatics in developing e-Government in the city of Tanjungpinang. The method used in this study was a qualitative descriptive method with 5 informants and data collection techniques and tools in the form of observation, interviews, and documentation with the research locus is Dinas Communication and Informatics Tanjungpinang City. The results of this study using the ITPOSMO theory from Hungger and Whalen are, (1) Information, The state of the Information owned by Diskominfo is by having the official website of the Tanjungpinang city government and SIPA Kominfo, (2) Technology, The state of the technology that exists at Dikominfo is a lack of network capacity, (3) Processes, As for the process carried out in the development of e-Government by providing network capacity and SIPA Kominfo, (4) Objective and Value, the situation to be achieved is the integrity of public services and employment archive, but for now what has started to have integrity is only the employment archive application (5) Staff and Skills. The condition of the staff and also the skills possessed by the Ministry of Communication and Informatics is that they still have incompetent human resources in the ICT field (6) Management and Structure, with the presence of Mayor Number 8 of 2022 and the existence of applications staffing formed by Pemko who are able to provide assistance in carrying out e-Government development in the city of Tanjungpinang (7) Others, the most influential resources are funds and time, Diskominfo is still experiencing a lack of funds due to post-Covid-19 economic recovery which causes all E-Government development efforts are hampered. The conclusion of this study is that the Tanjungpinang City Communications and Informatics Office in developing e-Government does not yet have its own innovative strategy due to unexpected obstacles such as Covid-19.

Keywords: Strategy, e-Government, Dinas Communication and Informatics

Abstrak

Pemerintah Kota Tanjungpinang sejak tahun 2018 sudah mulai melakukan perkembangan e-Government. Usaha pengembangan e-Government merupakan sasaran di dalam RPJMD 2018-2023 Kota Tanjungpinang pada tahun 2022 dengan roda penggerak adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika di dalam melakukan perkembangan e-Government di kota Tanjungpinang. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan informan sebanyak 5 orang serta menggunakan Teknik dan

alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan lokus penelitian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang. Adapun hasil penelitian ini dengan menggunakan teori ITPOSMO dari Richasrd Heeks adalah, (1) Information, Adapun Keadaan Information yang dimiliki oleh Diskominfo adalah dengan memiliki website resmi pemerintah kota Tanjungpinang dan SIPA Kominfo, (2) Technology, Adapun keadaan technology yang ada pada Dikominfo adalah kekurangan kapasitas jaringan, (3) Processes, adapun proses yang di lakukan di dalam pengembangan e-Government dengan cara penyediaan kapasitas jaringan dan SIPA Kominfo (4) Objective and Value, adapun situasi yang ingin di capai adalah terintegritasnya pelayanan publik dan arsip kepegawaian. Hanya saja untuk sekarang yang sudah mulai terintegritas hanyalah aplikasi arsip kepegawaian saja (5) Staff and Skill, Adapun keadaan staff dan juga skill yang dimiliki oleh dikominfo adalah masih memiliki SDM yang kurang berkompeten di bidang TIK (6) Management and Structure, dengan adanya perwako Nomor 8 Tahun 2022 dan terdapatnya aplikasi aplikasi kepegawaian yang di bentuk oleh pemko yang mampu memberikan bantuan di dalam melakukan perkembangan e-Government di kota Tanjungpinang (7) Others, sumber daya yang paling berpengaruh adalah dana dan waktu, diskominfo masih mengalami kekurangan dana akibat pemulihan ekonomi pasca covid-19 yang menyebabkan segala usaha perkembangan e-Government terhambat. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, Dinas Kominfo Kota Tanjungpinang di dalam melakukan pengembangan e-Government, belum memiliki inovasi strategi tersendiri di sebabkan karena adanya hambatan-hambatan yang tak terduga seperti Covid-19

Kata kunci: Strategi, e-Government, Dinas Komunikasi dan Informatika.

*Penulis Korespondensi
E-mail : nafisahaulia2001@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia sudah memasuki era revolusi industri 4.0 yang membuat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi semakin pesat. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan revolusi digital. Ditandai dengan adanya *Mobile Internet*, sensor yang lebih kecil dan cepat serta murah, *artificial intelligence*, dan *machine learning*. Pada era ini salah satu inovasi utamanya adalah adanya pemanfaatan *Internet of Thing (IoT)* berbasis *Artificial Intelligence* (kecerdasan buatan), *Drone Operation Centre*, *Big Data*, hingga rencana pengembangan *Virtual Workers*. Revolusi industri 4.0 tidak hanya berpotensi luar biasa dalam merombak industri, tetapi juga mengubah berbagai aspek kehidupan manusia (Yudoprakoso, 2019). Perkembangan Revolusi industri 4.0 membawa dampak besar bagi perkembangan dan kemajuan perekonomian dan peradapan sehingga perlu strategi untuk

memaksiamalkannya di berbagai aspek.

Strategi merupakan tujuan dan sasaran jangka panjang suatu organisasi dimana di dalamnya diterapkan suatu aksi serta alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan (Chandler, 1962). Sedangkan menurut (Itami, 1987) strategi adalah kegiatan menentukan suatu struktur kerja dari aktivitas organisasi serta memberikan pedoman untuk mengkoordinasi aktivitas sehingga organisasi mampu menyesuaikan dan mempengaruhi lingkungan yang selalu berubah. Strategi memberikan pengetahuan dengan jelas lingkungan yang seperti apa yang organisasi ingin kan.

Menurut (Bastian, 2016) setiap organisasi membutuhkan suatu strategi apabila menghadapi situasi seperti berikut :

- a. Sumber daya yang dimiliki terbatas

- b. Ketidak pastian terkait kemampuan dan daya saing organisasi
- c. Komitmen terhadap sumber daya yang tidak dapat diubah lagi
- d. Adanya kondisi antara bagian terhadap keputusan-keputusan yang akan diambil organisasi dalam kurun waktu tertentu
- e. Ketidakpastian terkait pengendalian inisiatif

Kunci sukses suatu organisasi adalah bagaimana rancangan suatu strategi tersebut dengan matang. Maka dari itu, strategi manajemen sektor publik mampu membantu organisasi saat menghadapi suatu masalah dan bagaimana memecahkan masalah tersebut untuk mencapai keberhasilan organisasi.

Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pemerintahan (*e-Government*) di harapkan mampu meningkatkan efisiensi, efektifitas serta transparansi dan akuntabel penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*. Dengan adanya kebijakan dan strategi pengembangan *e-Government* ini maka pemerintah yang di harapkan adalah pemerintah yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengurangi sekat-sekat organisasi birokrasi, seperti menyederhanakan proses pelayanan publik.

E-Government adalah sebagai pemanfaatan TIK dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan (Napitupulu et al., 2020). Terkait definisi *e-Government* di atas maka dapat di simpulkan bahwa karaktersitis

dari *e-Government* adalah sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK)
- b. Menyediakan akses terhadap informasi seluas-luasnya kepada masyarakat
- c. Meningkatkan kualitas layanan publik yang selama ini berjalan
- d. Memberikan kesempatan bagi warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses demokrasi
- e. Mekanisme relasi yang baru antara pemerintah dengan stakeholder

Perubahan penyelenggaraan pemerintah yang konvensional menjadi penyelenggaraan pemerintah yang berbasis teknologi dan informasi juga merupakan salah satu dari usaha di dalam reformasi birokrasi sehingga di dalam hal ini artinya *e-Government* bukan hanya semata mata merubah penyelenggaraan pemerintah menjadi penyelenggaraan pemerintah yang berbasis TIK saja, melainkan terdapat suatu yang diharapkan dari munculnya pemanfaatan TIK tersebut untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, meningkatnya pelayanan publik serta meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dari penyelenggaraan pemerintahan (Irawan, 2017).

Kota Tanjungpinang merupakan salah satu kota yang sedang melakukan perkembangan secara terus menerus, salah satu perkembangan yang sedang dilakukan adalah untuk menjadikan Kota Tanjungpinang menjadi Kota yang maju. Hal ini serupa dengan Visi dari walikota dan wakil walikota Tanjungpinang tahun 2018-2023, selain itu di terdapat pula salah satu Misi walikota dan wakil wali kota yang tertulis di RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023 yaitu "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung aparatur yang berintegritas dan kompeten”. Adapun berdasarkan misi tersebut di bentuklah suatu sasaran yang ingin dicapai salah satunya yaitu meningkatkan penerapan *e-Government*.

Berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian. Untuk itu Dinas Komunikasi dan Informasi di dalam peneraparan peningkatan *e-Government* mendapatkan peranan yang penting yaitu sebagai roda penggerak penerapan *e-Government* di kota Tanjungpinang. Hal ini juga sejalan dengan yang tertulis di RPJMD 2018-2023 Kota Tanjungpinang di mana yang menjadi perangkat daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab pada sasaran meningkatkan *e-Government* adalah Dinas Komunikasi dan Informatika kota Tanjungpinang.

Pelaksanaan *e-Government* di kota Tanjungpinang tentu tidak semudah membalikan telapak tangan, di dalam penerapannya masih terdapat kekurangan dan kelebihan hal ini dapat di lihat dari penilaian mandiri indeks SPBE kota Tanjungpinang pada tahun 2019, dimana menetapkan target dengan skor 2,05 sedangkan yang terealisasi memiliki skor 2,04 yang artinya capaian kinerja pada Indeks SPBE mencapai 99,5% dengan predikat “cukup”. Meskipun sudah mencapai

predikat “cukup” namun masih terdapat kendala-kendala di dalam mencapai target yang di inginkan Adapun salah satu penyebab nya sebab terbatasnya kompetensi petugas dan pemerintahan kota Tanjungpinang serta belum memiliki sistem monitorin dalam pemantauan efektifitas pemanfaatan aplikasi pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Hal ini terbukti jika di lihat dari progress report pendataan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Kota Tanjungpinang sebagai berikut

Tabel 1 Progres Pendataan SPBE Tahun 2022 Pemerintahan Kota Tanjungpinang

Jumlah Unit Kerja	Sudah Input	Belum Input
59	26 Unit kerja (44%)	33 Unit kerjra (56%)
Jumlah unit kerja yang tidak memiliki Sistem Informasi		11 Unit Kerja

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang (2023)

Pada tabel di atas dapat kita ketahui bersama masih banyak OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) di kota Tanjungpinang masih memiliki rasa kesadaran yang kurang untuk selalu berusaha meng-*upgrade* adanya inovasi aplikasi ataupun web yang telah di bentuk, sehingga banyak sekali aplikasi atau web pelayanan publik atau pelayanan internal organisasi yang tidak memiliki perkembangannya dengan baik seperti terjadi nya salah server atau bahkan aplikasi atau web tersebut hanya sekedar di buat tanpa kejelasan perkembangan pemanfaatannya, padahal tertera di dalam RPJMD 2018-2023 kota Tanjungpinang yang menjadi fokus

sasaran pada tahun 2022 adalah perkembangan *e-Government* akan tetapi hingga kini perkembangan tersebut belum terlihat dengan maksimal.

Hal tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Darmawan, 2018) yang mengatakan bahwa pemerintah kota Tanjungpinang di dalam melakukan pengembangan untuk menjadi *Smart City* masih sangat membutuhkan kesadaran di dalam melakukan inovasi-inovasi baru di dalam melakukan pengembangan *e-Government* sebab *Smart Government* merupakan penjunjang awal pembangunan *Smart City*. selain itu (Sitopu et al., 2021) menemukan bahwa Sumber Daya Manusia untuk menunjang keberhasilan pengimplementasian *e-Government* akan tetapi Berkaitan dengan kualitas SDM pemerintah Kota Tanjungpinang yang ada sudah memadai dan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, namun berkaitan dengan kuantitatif kebutuhan SDM masih kurang memadai, sehingga dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas layanan yang diberikan, hal ini di karenakan ketergantungan Pemerintahan Kota Tanjungpinang terhadap satu ahli, risiko tidak dikelola dengan baik, belum melakukan evaluasi terhadap kepuasan mutu, dokumentasi belum dilakukan dibeberapa bidang TI, prosedur dan kebijakan belum dilakukan dengan sungguh sungguh (Tukino, 2018).

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti berusaha meneliti terkait strategi apa yang di lakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika kota Tanjungpinang di dalam melakukan pengembangan *e-Government* di kota Tanjungpinang dengan melihat situasi dan kondisi permasalahan yang ada di lingkungan pemerintah kota tanjung pinang.

METODE PENELITIAN

Di dalam melakukan penelitian tentang Strategi Pengembangan *e-Government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, Peneliti menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif, dimana menurut (Gunawan, 2022) Penelitian yang bersifat dekskriptif kualitatif berusaha menggambarkan suatu kondisi dari objek berupa fenomena sosial yang ditemui secara nyata dan rill dengan kondisi yang ada di lapangan. Adapun Teknik di dalam pengumpulan data peneliti memilih dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Menurut (Bogdan, 1982) di dalam buku Sugiyono menyebutkan bahwa Kumpulan data hasil wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya dicari dan disusun dengan menggunakan metode analisis data agar dapat dipahami dan hasilnya dapat dibagikan kepada orang lain. Menemukan dan mengumpulkan data dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara rinci adalah cara lain untuk mendefinisikan pendekatan analisis data. **Reduksi Data**, proses meringkas, memilih, dan mengorganisasikan topik inti, berkonsentrasi pada apa yang dianggap relevan, kemudian mencari tema dan pola. **Penyajian Data**, Dalam penelitian kualitatif, penyajian data seringkali berbentuk ringkasan, grafik, korelasi antar kategori, dan alat bantu visual lainnya. Untuk memudahkan pemahaman kita tentang apa yang akan terjadi dan apa yang direncanakan untuk tahap selanjutnya berdasarkan apa yang kita ketahui sekarang, data ini telah disajikan. **Penarikan Kesimpulan**, bersifat sementara dan suatu saat akan berubah apabila ditemukan suatu bukti yang kuat yang akan mendukung pada tahap pengumpulan data. Penarikan kesimpulan di dalam

penelitian kualitatif kemungkinan mampu menjawab rumusan masalah di dalam penelitian

HASIL DAN DISKUSI/ANALISIS

Dalam penelitian ini, Strategi Pengembangan *e-Government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dianalisis dengan menggunakan teori dari Richard Heeks yang mengemukakan tentang 7 Indikator Penting di dalam pengembangan *e-Government* yaitu ITPOSMO. Adapun 7 indikator tersebut ialah ***Information, Tecnology, Processes, Objective and value, Staff and Skill, Manajemen , Others (Sumber daya lainnya)***. Adapun pembahasannya dapat dilihat dalam sub berikut :

Information

Pada indikator pertama ini terdapat *Information* (Informasi) adapun yang dimaksud dengan informasi di sini merupakan faktor-faktor yang berkaitan dengan kualitas dan persyaratan input dan output sistem (Ramanda et al., 2019).

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang tentunya telah melakukan berbagai cara dan memanfaatkan berbagai media di dalam usaha pengembangan *e-Government* salah satunya adalah dibuatlah website resmi pemerintah kota Tanjungpinang hal ini tentu dilakukan untuk mudahnya akses data informasi yang akurat sehingga terdapatnya transparansi yang disampaikan dari pemerintah kota kepada masyarakat dan informasi-informasi yang *up to date*.

Lebih lanjut Dinas Komunikasi dan Informatika di dalam pengembangan *e-Government* agar lebih terstruktur dengan baik juga menyediakan website SIPA Kominfo hal ini telah dilakukannya himbuan kepada semua OPD Tanjungpinang

untuk mendata berbagai bentuk aplikasi yang dimiliki kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang melalui surat perintah yang sudah di sebarakan, hal ini dilakukan sebab Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki kendali penuh terhadap perkembangan *e-Government* di kota Tanjungpinang agar berjalan lancar.

Semua OPD yang akan mendata aplikasinya nantinya dapat melapor di website yang sudah disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang yaitu SIPA Kominfo Kota Tanjungpinang. Adapun fungsi dari SIPA Kominfo ini adalah untuk mengathui inovasi-inovasi apa saja yang di perlukan dan di bentuk oleh OPD lain, sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika kota Tanjungpinang dapat *menghandel* serta mengverifikasi hingga mengevaluasi inovasi-inovasi aplikasi yang sekiranya sesuai dengan bisnis dari masing-masing OPD itu butuhkan.

Adapun *Information* (Informasi) yang sudah disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika di kota Tanjungpinang berdasarkan pemaparan di atas adalah dengan menyediakan website resmi pemerintah Kota Tanjungpinang hal ini dilakukan agar terdapatnya kemudahan akses untuk masyarakat di dalam mencari informasi terkait pemerintahan kota Tanjungpinang serta terciptanya transparansi. Selain itu di dalam melakukan perkembangan *e-Government* yang lebih teratur kini Dinas Komunikasi dan Kota Tanjungpinang sudah melakukan pergerakan yaitu menyurati dan menghimbau seluruh OPD yang memiliki aplikasi untuk wajib mendata ke Dinas Komunikasi dan Informatika kota Tanjungpinang melalui SIPA Kominfo Tanjungpinang,

hal ini di lakukan agar semua data aplikasi OPD dan kapasitas jaringan yang di laporkan OPD ke Dinas Komunikasi dan Informatika mampu *ter-handel* dengan baik dan tentunya seluruh pegawai di OPD lain dan Dinas Komunikasi dan Informatika di Kota Tanjungpinang dapat terus beradaptasi dengan perkembangan digitalisasi. Sehingga dengan adanya strategi dan usaha ini di harapkan mampu menciptakan kinerja di dalam pengembang *e-Government* menjadi berjalan efektif

Technology

Pada indikator kedua ini adalah *Technology* (Teknologi) hal yang berkaitan dengan faktor-faktor seperti ketersediaan dan kompatibilitas perangkat keras dan perangkat lunak faktor ini berperan penting dalam pengembangan, membandingkan persyaratan yang terkandung dalam desain *e-Government* (aplikasi) dengan situasi sebenarnya (Arief et al., 2021). Teknologi juga merupakan item yang vital dalam keberlangsungan pengembangan.

Adapun keadaan teknologi yang paling berpengaruh di dalam pengembangan *e-Government* adalah keadaan kapasitas jaringan atau *Bandwidth* sebab keberadaan kapasitas jaringan yang baik akan mendorong penggunaan *e-Government* menjadi lebih efektif. Akan tetapi kapasitas jaringan (*Bandwidth*) yang dimiliki oleh lingkungan internal maupun eksternal Dinas Komunikasi dan Informatika di dalam pengembangan *e-Government* cenderung kurang, sehingga di dalam suatu pembuatan aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika kota Tanjungpinang cenderung menyelesaikannya dengan secara bertahap dan lambat, hal ini juga

menjadi salah satu yang di protes oleh beberapa OPD pelayanan publik di karenakan OPD-OPD tersebut sangat membutuhkan kapasitas jaringan yang besar. Salah satu nya yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimana di dalam menyediakan layanan publik berbasis elektronik membutuhkan internet yang tidak biasa, mereka cenderung menggunakan VPN, maka dari itu OPD pelayanan ini juga merasakan pengaruhnya yang besar terhadap kekurangan kapasitas jaringan tersebut, selain itu Dinas Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) merasakan bahwa kekurangan kapasitas jaringan itu sangat besar pengaruhnya terutama untuk DMPTSP yang memiliki MPP (Mall Pelayanan Publik) dimana segala bentuk pelayanan sudah mulai beradaptasi dengan digitalisasi, yang semestinya membutuhkan kapasitas jaringan yang tinggi.

Selanjutnya untuk mengatasi kekurangan kapasitas jaringan (*Bandwidth*) maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang mengatasi nya dengan meminta penambahan kapasitas *Bandwidth* yang telah Dinas Komunikasi dan Informatika akujan di APBDP dan APBD 2024, serta SDM yang di rasa kurang.

Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti menemukan bahwa keadaan teknologi yang paling menunjang kemajuan pengembangan *e-Government* adalah kapasitas jaringan (*Bandwidth*), akan tetapi kapasitas jaringan (*Bandwidth*) yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika serta OPD yang lainnya masih cenderung minim sehingga dengan adanya hal ini maka kinerja atau pembuatan aplikasi yang di laporkan oleh OPD ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang cenderung bergerak

lambat. Akan tetapi di dalam mengatasi hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang untuk mengatasi kapasitas jaringan (*Bandwidth*) yang kurang Dinas Komunikasi dan Informatika sudah menghimbau semua OPD untuk membuat suatu aplikasi yang di rasa di perlukan dan sesuai dengan pelayanan yang ingin OPD berikan dan sudah membuat permohonan penambahan kapasitas jaringan (*Bandwidth*) yang di terakan di APBDP dan APBD 2024.

Processes

Pada indikator ketiga ini terdapat proses adapun proses yang di maksud adalah segala bentuk kegiatan yang di lakukan secara terstrukturi di dalam menyelesaikan atau mengerjakan suatu usaha yang ingin di ciptakan (Wijanarko et al., 2017).

Adapun proses yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang di dalam melakukan pengembangan *e-Government* sejalan dengan yang sudah di jelaskan dari dua indikator sebelumnya adalah yang pertama dengan menyediakan kapasitas jaringan (*Bandwidth*) dan mengintegritaskan fungsi SIPA Kominfo.

Pertama yaitu penyediaan kapasitas jaringan (*Bandwidth*) dengan cara melakukan bentuk kerja sama dengan pihak ke-3 untuk menyediakan provider jaringan selanjutnya membagi limit jaringan dan melakukan *assessment* (Tinjauan). Selanjutnya terdapat pembagian provider yang di lakukan berdasarkan kebutuhan masing-masing OPD. Terdapat 2 cara penggunaan yaitu memberikan masing-masing pegawai dengan limit tertentu dengan melakukan login Hostpot dan terdapat pula beberapa OPD yang di berikan

limit *Bandwidth*nya bukan per-orang melainkan OPD nya menyeluruh. Hal ini biasanya di berikan oleh OPD yang mempunyai aplikasi yang membutuhkan *Bandwidth* lebih.

Gambar 1 Login Hostpot



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang (2023)

Kedua didalam melakukan pengembangan aplikasi yang sudah di bentuk oleh masing-masing OPD, Dinas Komunikasi dan Informatika berharap lebih untuk seluruh OPD yang ada di kota Tanjungpinang dapat mendata aplikasinya melalui SIPA kominfo di karenakan nantinya inovasi aplikasi tersebut akan di verifikasi, sosialiasasi, dan evaluasi. adapun tata cara kerjanya adalah melalui 3 tahapan yaitu yang pertama melakukan integritas, mengakomodir dan memberi masukan, lalu menyediakan infrastruktur. Yang pertama yaitu integritas nantinya aplikasi yang sudah tersedia akan di verifikasi kegunaannya yg sesuai dengan tupoksi kerja OPD tersebut, selanjutnya akan di lakukan evaluasi aplikasi, dimana yang tidak di perlukan atau di dalam artian sudah memiliki fungsi yang sama atau tidak sesuai dengan tupoksi OPD nya maka hal ini tidak di perlukan. Lalu yang kedua akomodir maksudnya adalah memberi masukan hal-hal terkait perkembangan aplikasinya bagusnya dapat di perbaiki atau bisa memberikan masukan kepada pengembangnya, lalu yang ketiga akan di sediakan infrastrukturnya akan

tetapi tentu hal ini tidak dapat di laksanakan dengan cepat di karena sifat programmer bermacam-macam Dinas Kominfo Kota Tanjungpinang juga harus mengikuti anggaran daerah. Sehingga untuk hal terakhir ini saat ini kebanyakan aplikasi yang di data masih memiliki server dari luar atau aplikasi yg di kembangkan di luar bukan dari diskominfo kota Tanjungpinang, yang artinya masih terdapat kekurangan anggaran dan kominfo sendiri belum memiliki fasilitas yang lengkap.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di simpulkan bersama adapun proses yang di lakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang adalah melalui 2

tahapan yaitu menyediakan Kapasitas jaringan (*Bandwidth*) untuk mendukung penggunaan aplikasi dan penyediaan SIPA Kominfo untuk mendata dan meng-handel aplikasi yang ada di pemerintahan kota Tanjungpinang.

Akan tetapi tentunya kegiatan dan proses pengembangan *e-Government* yang sudah di jelaskan masih memiliki beberapa kekurangan. Mulai dari kapasitas jaringan yang di rasa masih kurang, kurangnya infrastruktur dari dikominfo, kurangnya dana yang di berikan, hingga masih banyak OPD yang membuat aplikasi dengan menggunakan server dari luar.

Tabel 2 Aplikasi OPD yang sudah terintegritas

OPD	NAMA APLIKASI	KEGUNAAN
Dinas Perhubungan	Perparkiran	Parkir
Dinas Pemuda dan Olahraga	Dakota	Pelayanan yang sifatnya databes kepemudaan dan olahraga
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	GIS	Pendataan UMKM

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang (2023)

Objective and Value

Pada indikator keempat ini adalah Objective and Value. Adapun yang di maksud disini adalah suatu tujuan dan nilai-nilai yang hendak dicapai dari proyek *e-Government* (Irawan, 2017).

Hal ini sama dengan budaya organisasi, kumpulan nilai-nilai adapun *value* atau objek yang hendak dan ingin di capai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang adalah untuk mengembangkan pelayanan yang lebih maju dengan sesuai perkembangan zaman nya yaitu pelayanan yang berbasis elektronik, sehingga dengan adanya ini semua

pelayanan dapat terpenuhi dengan praktis.

Peneliti menemui bahwa di lingkungan pemerintahan Kota Tanjungpinang di dalam pengembangan *e-Government* masih memiliki sedikit aplikasi pelayanan publik yang terintegritas. Dimana aplikasi-aplikasi yang sudah berkembang hanyalah aplikasi kepegawaian sedangkan aplikasi pelayanan publik masih di temukan berasal dari pusat. Yang artinya masih adanya pengembangan aplikasi yang servernya berasal dari luar bukan berasal dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.

Dengan belum terintegritasnya aplikasi pelayanan publik dengan

baik, maka dari itu Dinas Kominfo Kota Tanjungpinang menyediakan pusat data atau server Diskominfo yang telah buat sehingga diharapkan dapat bertanggung jawab dengan pengamanan data dan dapat dipusatkan ke diskominfo. Sehingga hal-hal yang sekiranya harus dihindari dapat di hindari, dikarenakan kalau di kembangkan dari luar maka servernya akan berbeda-beda sehingga kebijakannya juga berbeda-beda, jika Diskominfo Kota Tanjungpinang yang mengembangkannya maka Diskominfo Kota Tanjungpinang dapat mengakomodir dan membuat aplikasi itu bermanfaat. Tetapi hal ini tentu di butuhkan proses yang tidak sebentar.

Berdasarkan hasil dari pemaparan di atas, maka dapat di temukan bahwa pengembangan e-Government di lakukan agar terdapatnya *upgrade* pelayanan publik dan juga arsip kepegawaian yang lebih efektif, efisien dan mudah sehingga segala kebutuhan dapat di penuhi dengan mudah dan maksimal. Akan tetapi untuk sekarang pengembangan *e-Government* yang sudah mulai terintegritas hanyalah aplikasi kepegawaian. Sedangkan aplikasi pelayanan publik belum dapat terintegrasi dengan baik.

Staff and Skill

Pada indikator kelima ini adalah *Staff* dan *Skill* yang di maksud adalah ketersediaan SDM yang terampil dan kecukupan pelatihan yang disediakan untuk mengaplikasikan sistem (Pamungkas et al., 2020).

Adapun kondisi *staff* dan *skill* yang di miliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang di dalam upaya pengembangan *e-Government* sudah melakukan beberapa pelatihan, hanya saja di dalam pelaksanaannya belum terlalu

rutin dan menyeluruh di akibat kan adanya kendala dana akibat pemulihan paska Covid-19. Sehingga dengan adanya situasi tersebut pelatihan yang di lakukan hanya untuk *staff staff* yang sekiranya memiliki minat kearah IT atau yang sudah berkompeten di bidang IT. Maka dari itu di dalam mengatasi permasalahan ini Dinas Kominfo Kota Tanjungpinang akan melaksanakan analisa kebutuhan jabatan serta kebutuhan kerja yang dibutuhkan terkait penerapan sistem kerja SPBE. Dimana awalnya Dinas Kominfo Kota Tanjungpinang masih mempunyai sedikit SDM yang berkompeten di bidang TIK, maka Dinas Kominfo Kota Tanjungpinang akan mengajukan usulan penambahan pegawai melalui perekrutan CPNS dan perekrutan SDM yang kapabel dari OPD-OPD lainnya. Meskipun hal ini masih di rasa kurang namun para SDM yang berkompeten itulah yang nantinya di harapkan mampu untuk mempersiapkan perkembangan *e-Government*.

Selain itu juga Dinas Kominfo Kota Tanjungpinang kini sudah mulai membiasakan para SDM kami untuk terbiasa dengan aplikasi-aplikasi yang di atur atau berkenaan dengan urusan pemerintahan seperti Absensi presensi pegawai online, Tanda tangan elektronik, hingga kinerja pegawai kini kami menggunakan elektronisasi.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat dinilai bahwa keadaan *Staff* dan *Skill* yang di miliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika cenderung kurang di karena kan adanya kekurangan SDM yang berkompeten di bidang TIK akibat kurangnya pelatihan berbasis TIK yang menyeluruh. Hal ini di sebabkan oleh adanya pelaksanaan pelatihan TIK yang kurang menyeluruh akibat kekurangan dana, dimana hal ini di sebabkan oleh

pemerintah sedang berfokus pada pemulihan ekonomi pasca Covid-19.

Akan tetapi di dalam mensiasati keadaan ini, untuk sementara Dinas Komunikasi dan Informatika mengharapkan SDM yang sudah berkompeten di bidang TIK untuk bisa berkerjasama dengan SDM lainnya dengan baik, dan juga membiasakan seluruh SDM yang ada untuk selalu beradaptasi dengan digitalisasi dari inovasi aplikasi kepegawaian yang sudah di bentuk oleh pemerintah.

Management and Structures

Pada indikator keenam ini terdapat *Management and Structures* yang artinya suatu cara kerja sistem manajemen yang dibutuhkan untuk mengatur organisasi beserta cara organisasi tersebut terstruktur baik formal maupun non formal di mana biasanya hal ini di buat dalam sistem kerja atau program kerja yang di miliki oleh suatu organisasi yang terkait (Heeks, 2006).

Dinas komunikasi dan informatika Kota Tanjungpinang di dalam mengembangkan *e-Government* di lingkungan kerja pemerintahan kota Tanjungpinang sudah memiliki beberapa program kerja yang memfokuskan untuk strategi pengembangan *e-Government* yaitu mengikuti program Smart City dan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Pertama yaitu mengikuti program *Smart City* dimana Menyusun inovasi yang memungkinkan di laksanakan oleh OPD dalam rangka pengembangan Tanjungpinang *Smart City*, dimana di dalam *Smart City* terdapat rencana strategis yang memang awalnya di buat untuk mendorong OPD untuk melakukan inovasi, yang mampu membuat Kota Tanjungpinang menjadi Kota Cerdas

dengan itu OPD nantinya memberikan informasi terkait program yang bersentuhan dengan *e-Government* seperti pengembangan aplikasi.

Kedua ada Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik atau (SPBE) nah ini tertulis di dalam perpres nomor 95 tahun 2018 dimana di dalam perpres ini daerah di harapkan dapat mewujudkan layanan administrasi dan publik secara elektronik dengan menyusun strategi, aturan, dan bagaimana tata laksananya. Agar yang dilakukan dapat berjalan lancar sehingga ada tahapan penyusunan data, didokumentasikan, siapa saja yang terlibat, dan audit. Tata Kelola SPBE ini merupakan Strategi untuk menciptakan *e-Government* yang teratur. Kedua program kerja tersebut di bentuk berdasarkan perwako No 8 Tahun 2022 hal ini sebagai dasar penyelenggara *e-Government* di Kota Tanjungpinang agar lebih terstruktur sehingga dengan adanya regulasi tersebut seluruh pegawai OPD yang berada di kota Tanjungpinang memhami apa prioritasnya.

Selain terdapatnya program kerja dan regulasi yang di jelaskan diatas, di dalam pengembangan *e-Government* terdapat pula beberapa aplikasi inovasi yang di bentuk sebagai cara untuk membiasakan semua pegawai di pemerintah Kota Tanjungpinang untuk mampu beradaptasi dengan elektronisasi adalah dengan membuat aplikasi kepegawaian yaitu skrikandi dan Apekeje. Selain kedua aplikasi tersebut terdapat juga aplikasi SIAP, kini pemerintah kota Tanjungpinang juga mulai membiasakan perangkatnya untuk menggunakan aplikasi SIAP yang sudah di bentuk sejak tanggal 25 Juli 2022 dan sudah dilakukan pelatihannya.

Adapun situasi yang sesuai dengan indikator Management and Structures yang ada pada lingkungan

kerja Dinas Komunikasi dan Informatika kota Tanjungpinang di dalam menghadapi pengembangan *e-Government* di Kota Tanjungpinang adalah sudah memiliki program kerja yang sesuai dengan perwako nomor 08 tahun 2022, hal ini dilakukan agar pengembangan *e-Government* yang sedang dilakukan memiliki alur yang terstruktur dan memiliki prioritas pengerjaannya. Selain memiliki program kerja, Dinas Komunikasi dan Informatika juga membiasakan seluruh pegawainya harus beradaptasi dengan digitalisasi di lingkungan kerjanya, sehingga dengan ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang menerapkan aplikasi inovasi arsip kinerja yang disediakan dari pemerintah kota yaitu Srikandi, APEKEJE dan SIAP.

Others

Pada indikator yang terakhir ini terdapat Others atau sumber daya lainnya seperti contohnya waktu dan uang (Alduraywish et al., 2017). Adapun sumber daya lainnya yang paling penting di dalam usaha pengembangan *e-Government* oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, adalah keadaan Dana dan waktu karena dengan adanya situasi Covid-19 di tahun 2020-2022 yang semestinya pengembangan *e-Government* di fokuskan pada tahun 2022 akan tetapi kini pemerintah lebih memfokuskan kepada pemulihan perekonomian pasca Covid-19 sehingga hal-hal yang bersifat tidak terlalu *urgent* seperti dana atau biaya nya lebih di fokuskan untuk pemulihan ekonomi pasca Covid-19, sehingga dengan adanya hal ini hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan inovasi aplikasi, pelatihan pegawai di bidang TIK, penemuan kapasitas jaringan atau *Bandwidth*, serta menghire pihak ke 3 di dalam

kepentingan pengembangan *e-Government* tertunda dan berjalan tidak maksimal.

untuk mengsiyasi kekurangan dana akibat pemulihan ekonomi pasca Covid-19, maka kini Dinas Komunikasi menggunakan metode adopsi, tiru dan modifikasi, hal ini sudah di lakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang yang berkerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau yaitu mengadopsi salah satu platform nya yaitu Simanja.

Adapun situasi yang sesuai dengan indikator Others (sumber daya lainnya) yang di hadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika kota Tanjungpinang hadapi di dalam pengembangan *e-Government* di Kota Tanjungpinang adalah terletak di permasalahan dana dan waktu yang di berikan oleh pemko kota Tanjungpinang, hal ini terjadi sebab pemerintah kota sedang berfokus pada pemulihan pasca covid-19 sedangkan pengembangan *e-Government* membutuhkan banyak biaya agar dapat terealisasi dengan baik contohnya seperti membutuhkan penambahan kapasitas jaringan (*Bandwidth*) yang tinggi, meng-hier pihak ke 3 yang berkompeten di dalam pembuatan aplikasi untuk menciptakan inovasi aplikasi baru, dan penyediaan kebutuhan lainnya.

Berdasarkan permasalahan di atas Adapun strategi yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang lakukan untuk menutupi kekurangan-keurangan yang ada maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang di dalam menciptakan suatu inovasi pelayanan elektronik dengan menggunakan metode adaptasi, tiru, dan modifikasi hal ini sudah pernah dilakukan Dinas Kominfo Kota Tanjungpinang dimana mereka mengadaptasi aplikasi

Simanja dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kepulauan Riau. Meskipun hingga kini Kota Tanjungpinang masih memiliki pelayanan publik berbasis elektronik hanya sedikit, tetapi dengan menggunakan metode ini diharapkan mampu menutupi keterlambatan pengembangan *e-Government* yang sempat tertunda.

KESIMPULAN

Strategi Pengembangan *e-Government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, Pengembangan *e-Government* nya masih belum memiliki strategi yang pasti sehingga hal ini menyebabkan struktur kerjanya masih belum tersusun hal ini tentu di akibatkan karena terdapatnya kekurangan dana akibat pemerintah sedang fokus pada pemulihan ekonomi pasca covid-19 yang penyebabnya minimnya SDM yang mahir akan TIK akibat tidak adanya pelatihan secara teratur dan infrastruktur yang kurang.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian, peneliti menilai bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika lebih banyak membuat website atau aplikasi berbasis kinerja pegawai, yang artinya untuk sekarang pengembangan *e-Government* cenderung yang merasakan hanyalah pegawai pemerintahan saja, untuk inovasi aplikasi pelayanan publik di rasa masih kurang ketersediaannya.

PENGHARGAAN

Ucapan terima kasih kepada para yang mendukung penelitian ini antara lain:

(1) Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau

(2) Pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang yang telah memberikan sumbangan pemikiran serta basis data dan informasi sehingga penulis dapat mengajikan data sesuai dengan objek gagasan penelitian yang telah dicapai.

REFERENSI

- Alduraywish, Y., Xu, Y., & Salonitis, K. (2017). Evaluating state of information systems failure in developing countries using ITPOSMO model. *2017 23rd International Conference on Automation and Computing (ICAC)*, 1–5.
- Arief, A., Wahab, I. H. A., & Sensuse, D. I. (2021). Model ITPOSMO untuk Evaluasi E-Government: Tinjauan Studi Kasus. *Jurnal Ilmiah Fifo*, *13*(2), 106–116.
- Bastian, I. (2016). *Strategi Manajemen Sektor Publik* (D. A.Halim (ed.); 1st ed.). Salemba Empat.
- Bogdan, R. C. (1982). *Qualitative Research For Education; An Introduction to Theory and Methods*; Allyn and Bacon.
- Chandler, A. (1962). *Strategy and Structure: Chapter in The History of the American Industrial Enterprise*. MIT Press.
- Darmawan, E. (2018). Perkembangan Smart City Kota Tanjungpinang. *Kemudi*, *2*(2), 60–78.
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Bumi Aksara.
- Heeks, R. (2006). Health information systems: Failure, success and improvisation. *International Journal of Medical Informatics*, *75*(2), 125–137.
- Irawan, B. (2017). Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Paradigma (JP)*, *2*(1), 174–201.

- Itami, H. (1987). Mobilizing Invisible Assets. In *harvard University press*.
- Napitupulu, D., Lubis, M. R., Revida, E., Putra, S. H., Saputra, S., Negara, E. S., & Simarmata, J. (2020). *E-Government: Implementasi, Strategi dan Inovasi*. Yayasan Kita Menulis.
- Pamungkas, A. R., Nugroho, L. E., & Sulisty, S. (2020). Evaluasi Faktor Kegagalan Sistem Informasi Pada Kesiapan Penerapan E-Government: Studi Literatur. *JIKO (Jurnal Informatika Dan Komputer)*, 3(3), 143–152.
- Ramanda, K., Fakriza, M. H., & Palasara, N. D. (2019). Evaluasi Keberhasilan Aplikasi Qlue Menggunakan Model ITPOSMO. *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi Dan Komputer)*, 8(2), 98–104.
- Sitopu, P. L., Edison, E., & Okparizan, O. (2021). ANALISIS PENERAPAN SISTEM E-GOVERNMENT PADA REALISASI PAJAK PENGHASILAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI KOTA TANJUNGPINANG. *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(2), 1358–1370.
- Tukino, T. (2018). Analisis IT Governance SIPKD di Kantor Pemerintahan Kota Tanjung Pinang Pendekatan COBIT Framework. *Jurnal Komputer Terapan*, 4(1), 10–20.
- Wijanarko, A., Utami, E., & Henderi, H. (2017). EVALUASI KEBERHASILAN WEBSITE PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DENGAN METODE ITPOSMO. *Jurnal Ekonomi Dan Teknik Informatika*, 4(1), 12–24.
- Yudoprakoso, P. W. (2019). Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang Dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 450–461.